

Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Di Puskesmas Gorua Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara

Anita Paliema
Patar Rumapea

***Abstract:** The evidence suggests also that Gorua health centers still lack the human resources in this casemedical personnel. This study uses qualitative methods. Data were collected through interviews and observation techniques. Interviews were conducted at 45 of the informant elements service providers and service recipients. This study consists of four dimensions, namely communication, resources, disposition, and organizational structure / bureaucracy, it turns out that the low isindicated that human resource dimensions Goruahealth centers still lack the medical personnel. The conclusion that can be drawn from these results is that in general, the implementation of public health care policy in health centers Tobelo Gorua Northern District high enough, but not optimal. This is due to that health center Gorua There are still limitations, namely in terms of the human resources of medical personnel (doctor). Generally recommended advice to the Government of North Halmahera in order to make Government Area of the health services. And in accordance with 4 (four) Indicator research problems. The government is expected to improve the management of public services provision of Human Resources (HR) in this case the medical personnel who considered capable of providing anytindakan in accordance with the competency owned.*

***Keywords:** Public Health Service, Policy Implementation Gorua Health Center*

Puskesmas merupakan salah satu unsure dalam kerangka tatanan atau system kesehatan nasional yang harus dapat memenuhi tujuan pembangunan kesehatan, yaitu untuk mencapai kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan, karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan. Hal ini dipertegas oleh Udoji (1981) dalam (Sinambelu, 2010), mengatakan bahwa: “hasil akhir implementasi kebijakan paling tidak terwujud dalam beberapa indikator yakni hasil atau output yang biasanya terwujud dalam bentuk konkret, keluaran atau *outcome* yang biasanya berwujud rumusan target semisal tercapainya pengertian masyarakat atau lembaga, manfaat atau *benefit* yang wujudnya beragam; dampak atau *impact* baik yang diinginkan maupun yang tak diinginkan serta kelompok target baik individu maupun kelompok”. (Edward III) dalam

*Anita Paliema adalah Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik FISIP Unsrat
Patar Rumapea adalah Dosen Program Studi Administrasi Publik FISIP Unsrat*

Indiahono bahwa ada empat model yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi kebijakan, yakni: komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur organisasi.

Kesehatan masyarakat adalah ilmu dan seni mencegah penyakit, memperpanjang hidup, dan meningkatkan kesehatan melalui usaha-usaha pengorganisasian masyarakat untuk: Memperbaiki sanitasi lingkungan, Pemberantasan penyakit menular, Pendidikan untuk kebersihan perorangan, Pengorganisasian pelayanan-pelayanan medis dan perawatan untuk diagnosis dini serta pengobatan, Pengembangan rekayasa sosial untuk menjamin setiap orang terpenuhi kebutuhan hidup yang layak dalam memelihara kesehatannya (Notoatmodjo, 2010).

Oleh sebab itu Puskesmas Gorua merupakan lembaga yang menangani masalah pelayanan kesehatan di Tobelo Utara yang mempunyai peranan yang cukup besar dalam rangka menciptakan pemeliharaan kesehatan masyarakat di Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara, namun pelayanan yang diberikan kepada masyarakat belum optimal karena Kabupaten Halmahera Utara belum adanya peraturan daerah tentang pelayanan kesehatan. Fakta menunjukkan juga bahwa puskesmas Gorua masih kekurangan sumber daya manusia dalam hal ini tenaga medis, dimana kebijakan yang ditetapkan dalam data ketenagaan puskesmas gorua bahwa sarana-sarana dalam hal ini tenaga medis yang dibutuhkan tidak ada ketersediaannya yakni Dokter Gigi, Asisten Apoteker, dan analisis kesehatan. Sebagai bagian dari instansi publik yang melayani kesehatan masyarakat di tingkat bawah, maka Puskesmas Gorua kecamatan Tobelo Utara sesuai hasil pra-survei menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pelayanan kesehatan masyarakat belum berjalan sesuai yang diharapkan.

Dengan bertitik tolak pada permasalahan di atas, maka saya tertarik untuk meneliti tentang “Kebijakan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gorua Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kualitatif yakni metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data di lakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif /kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi, (Sugiyono 2010).

Fokus penelitian ini adalah implementasi kebijakan pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Gorua Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara. Fokus penelitian tersebut didefinisikan sebagai pelaksanaan dari program pelayanan kesehatan masyarakat dengan melihat beberapa indicator permasalahan dalam penelitian ini, yaitu : komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur organisasi.

Jenis data penelitian yang digunakan untuk dianalisis yaitu jenis data primer.informan dalam penelitian ini sebanyak 45 orang. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara, dokumentasi dan pengumpulan data sekunder. Cara analisis data dalam penelitian ini digunakan teknik analisis data kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana telah dikemukakan dalam uraian sebelumnya bahwa dalam penelitian ini melihat salah satu kebijakan tentang pelayanan kesehatan masyarakat yang di implementasikan oleh puskesmas gorua kecamatan tobelo utara. Oleh sebab itu untuk menjawab permasalahan penelitian, maka telah dilakukan pengumpulan data dengan menggunakan teknik-teknik wawancara, dan observasi lapangan.

Pengumpulan data dilakukan dengan mengacu pada indikator-indikator atau dimensi-dimensi implementasi kebijakan, yang dalam penelitian ini adalah Pemerintah Puskesmas Gorua kecamatan Tobelo Utara. Hasil pengumpulan data terhadap dimensi-dimensi implementasi kebijakan pemerintah puskesmas yang meliputi yakni Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Organisasi.

Keberhasilan implementasi kebijakan pelayanan kesehatan masyarakat implementor mampu mengetahui apa yang harus dilakukan, atau harus mengetahui pokok-pokok kebijakan atau isi kebijakan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi kebijakan pelayanan kesehatan. Sebab tanpa komunikasi yang baik tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. Dengan demikian komunikasi yang dimaksud dalam hal ini promosi ataupun penerangan/penjelasan tentang jenis/bentuk program serta tujuan dan sasaran program pelayanan kesehatan oleh pihak puskesmas kepada kelompok sasaran (masyarakat);

Dengan itu walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor maupun pelaksana kebijakan kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi kebijakan pelayanan kesehatan tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia (tenaga medis), maupun sarana dan prasarana, kompetensi implementor dan sumber daya financial, yakni dalam hal ini ketersediaan dan tingkat memadainya sumberdaya yang diperlukan dalam implementasi program, seperti : sumberdaya manusia (pegawai/petugas pelayanan), sumberdaya finansial (dana/anggaran), fasilitas dan peralatan pendukung lainnya yang tersedia di puskesmas;

Disposisi Merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, bahkan pelaksana kebijakan seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis dalam mengimplementasikan kebijakan pelayanan kesehatan masyarakat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa disposisi yaitu karakteristik yang menempel kepada implementor, (pegawai/petugas) seperti : komitmen dalam memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya; kejujuran; semangat pengabdian;

Organisasi merupakan suatu sistem aktivitas kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Struktur organisasi merupakan yang bertugas mengimplementasikan kebijakan pelayanan kesehatan dengan memiliki pengaturan yang signifikan terhadap implementasi kebijakan pelayanan kesehatan masyarakat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa struktur organisasi yang dimaksud adalah struktur organisasi pelaksana pelayanan dan mekanisme/prosedur pelayanan yang jelas, sistimatis, tidak berbelit-belit, mudah dipahami oleh masyarakat penerima pelayanan.

Dengan menganalisis hasil wawancara dari 15 informan pelaksana kebijakan, dan 30 responden yakni masyarakat yang memberi komentar dari masing-masing aspek sebagai berikut:

- 1) Aspek komunikasi, 45 responden berpendapat bahwa komunikasi dalam pelayanan sudah memadai dimana setiap isi kebijakan, tujuan dan sasaran pelayanan yang akan di implementasikan, oleh pimpinan selalu mengkomunikasikan terlebih dahulu kepada pelaksana kebijakan, bahkan pelaksana kebijakan pelayanan selalu memberikan sosialisasi atau penjelasan tentang bentuk program serta tujuan dan sasaran program pelayanan kesehatan kepada kelompok sasaran yakni masyarakat.
- 2) Aspek sumberdaya, 45 responden berkomentar yang sama bahwa ketersediaan dan tingkat memadainya sumberdaya yang diperlukan dalam implementasi kebijakan ”jumlah tenaga medis dipuskesmas belum optimal karena masih dibutuhkan tenaga medis.
- 3) Aspek disposisi, yakni 45 responden berkomentar yang sama bahwa karakteristik yang menempel kepada implementor program (pegawai/petugas), seperti komitmen dalam memberikan pelayanan kesehatan dengan sebaik-baiknya; kejujuran; semangat pengabdian sudah memadai.
- 4) Aspek struktur Organisasi, 45 responden berkomentar yang sama juga bahwa struktur organisasi pelaksana pelayanan dan mekanisme pelayanan sudah memadai, karena pelayanannya jelas, sistematis, tidak berbelit-belit, mudah dipahami oleh masyarakat penerima pelayanan.

Hasil pengumpulan data sesuai indikator-indikator implementasi kebijakan pemerintah puskesmas gorua yang meliputi yakni Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Organisasi, berikut hasil analisis peneliti dari beberapa teori yang bersangkutan dengan indikator penelitian ini, yakni:

1. Komunikasi

Dengan menganalisis hasil wawancara sesuai teori bahwa komunikasi yang dibangun oleh pimpinan puskesmas dengan pemberi pelayanan kesehatan di puskesmas gorua sudah memadai, karena sebagai pimpinan puskesmas setiap isi kebijakan, tujuan dan sasaran dalam mengimplementasikan kebijakan pelayanan kesehatan selalu mengkomunikasikan kepada pelaksana pelayanan kesehatan, sehingga pelaksana pelayanan kesehatan juga jelas mempromosikan kepada kelompok sasaran yakni pasien untuk bagaimana alur dalam pelayanan yang dimaksud puskesmas agar sasaran dan tujuan dari pemberi dan penerima pelayanan kesehatan jelas.

2. Sumberdaya

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sumberdaya manusia dalam hal ini tenaga para medis belum optimal karena sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan dalam ketenagaan puskesmas tenaga medis di puskesmas masih minim, sumberdaya finansial dan fasilitas dan peralatan lainnya cukup memadai dalam mendukung aktivitas pelayanan kesehatan masyarakat, tapi belum dikatakan optimal karena sarana dan prasarana puskesmas masih belum dilengkapi.

3. Disposisi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pimpinan puskesmas, dokter dan tenaga medis lainnya, sudah memiliki komitmen yang tinggi, sifat kejujuran

semangat pengabdian yang tinggi dalam mengimplementasikan kebijakan pelayanan kesehatan, dan memiliki sifat demokratis yang memadai dalam memberikan pelayanan kepada pasien.

4. Struktur Organisasi

Hasil wawancara senada dengan observasi bahwa puskesmas gorua memiliki aturan yang jelas atau aturan operasional/prosedur kerja (SPO) yang jelas dalam mengatur tugas/fungsi dari masing-masing orang/jabatan yang ada dalam melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat, pun sudah memberi pelayanan yang memadai karena prosedur pelayanan telah diatur menurut bagian/poli dan ditempel pada papan pengumuman untuk memudahkan para pasien menjalani perawatan kesehatan

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Implementasi Kebijakan pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Gorua masih berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No 128/ MENKES/ SK /II/2004 tentang kebijakan dasar pusat kesehatan masyarakat karena berhubung Kabupaten Halmahera Utara belum memiliki peraturan daerah (PERDA) tentang pelayanan kesehatan masyarakat, serta dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah secara umum dari empat aspek indicator bahwa implementasi kebijakan pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Gorua Kecamatan Tobelo Utara cukup tinggi, namun belum optimal. Hal ini disebabkan bahwa Puskesmas Gorua Masih ada keterbatasan, yakni dari segi sumber daya manusia yaitu tenaga medis (Dokter).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian ini, maka dapat direkomendasikan saran secara umum kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara agar dapat membuat PERDA tentang pelayanan kesehatan, dan sesuai dengan 4 (empat) Indikator permasalahan penelitian. Diharapkan Pemerintah dapat meningkatkan manajemen pelayanan kepada masyarakat yakni penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal ini para tenaga medis yang dinilai mampu memberikan segala bentuk tindakan yang sesuai dengan kompetensi yang di miliki.

DAFTAR PUSTAKA

- Indiahonov Dwiyanto, 2010, *Perbandingan Administrasi Public, Model, Konsep Dan Aplikasi*
- Notoatmodjo Soekidjo, 2010, *Promosi Kesehatan Teori Dan Aplikasi*, Edisi Revisi
- Sugiyono, (2010)*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* Penerbit Alfabeta
- Sinambelu Lijan Poltak, 2010. *Reformasi Pelayanan Publik*. Bumi Aksar. Jakarta.